

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOAKSI UMUM, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH

Anisa Aulia Febrianti

auliaanisa271@gmail.com

Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of Local Own-source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Local Expenditure on Local independence in districts /cities in East Java Province. The research applies quantitatively. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, in which the samples were based on determined criteria. The population consists of districts/cities Local Government in East Java Province. Moreover, the sample was some districts/cities in East Java Province with a high PAD value. In line with that, there was complete data for 6 districts/ cities in East Java Province as samples during the observation period of 2019- 2023. The data were secondary, in the form of the Realization Report of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) obtained from www.djpk.kemenkeu.go.id. In addition, the result indicates that PAD has a positive effect on local independence. On the other hand, both DAU and local expenditure does not affect local independence.

Keywords: local own-source revenue, general allocation fund, local expenditure, and local independence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan sampel dari penelitian ini menggunakan beberapa wilayah Kabupaten/Kota dengan nilai PAD tinggi dan terdapat data yang lengkap sejumlah 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan sampel yaitu tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari www.djpk.kemenkeu.go.id. Metode analisis pada penelitian menggunakan Regresi Linear Berganda dengan bantuan program SPSS Versi 26. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah. Sedangkan DAU dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja daerah, kemandirian daerah

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan atau penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya daerah serta pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat setempat (Anggoro, 2017). Pendapatan Asli Daerah berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah tersebut. Pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sehingga perkembangan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam memaksimalkan PAD.

Kemandirian daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan kebijakan otonomi daerah yang mulai diterapkan pada tahun 2001. Kemandirian daerah dapat didefinisikan sebagai sejauh mana pemerintah bergantung pada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan mengingat bahwa program pembangunan di berbagai sektor memerlukan biaya atau investasi yang cukup besar. Daerah yang mampu mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dianggap sebagai daerah yang mandiri. Kemandirian daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri aktivitas pemerintahan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Namun, tidak semua daerah memiliki tingkat kemandirian yang sama. Beberapa daerah masih menghadapi banyak tantangan termasuk PAD yang rendah, pengelolaan keuangan yang buruk, dan keterbatasan infrastruktur.

Analisis kemandirian daerah dipengaruhi oleh berbagai unsur yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran pada APBD yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Salah satu komponen utama yang berperan penting dalam kemandirian daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat (Basri et al, 2013). Jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan bantuan dana dari pemerintah pusat maka daerah tersebut dianggap sebagai daerah yang mandiri secara finansial.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dalam mendanai berbagai kegiatan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah (Juniawan, 2018). Untuk mengatasi hal ini pemerintah mengalokasikan dana dari APBN guna mendanai kebutuhan daerah melalui pelaksanaan desentralisasi salah satunya dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan peraturan pemerintah No. 5 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bentuk bantuan keuangan yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau bisa disebut dengan dana perimbangan. Tujuan transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan memastikan tercapainya standar pelayanan publik.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Kemandirian Daerah juga dipengaruhi oleh Belanja Daerah. Pengeluaran yang tercantum dalam APBD mencakup kegiatan rutin untuk mendanai kegiatan operasional pemerintahan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban yang diakui oleh daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selama periode anggaran periode tertentu. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan serta pelayanan publik. Melalui alokasi anggaran belanja, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah?, (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah?, (3) Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah, (2) Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah, (3) Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemandirian Daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan hubungan terkait dengan sebuah kontrak perjanjian dimana terdapat satu atau lebih prinsipal sebagai pihak pertama yang melimpahkan wewenang kepada pihak agen untuk kepentingan mereka. Menurut Liando (2017:13) pihak prinsipal sebagai pihak yang membuat tugas dan memberikan perintah atas sebuah kontrak sedangkan pihak agen sebagai pihak yang menerima dan menjelaskan perintah kontrak sesuai permintaan pihak prinsipal. Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002). Kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat efektif
100	Efektif
90-99	Cukup efektif
75-89	Kurang efektif
<75	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antar daerah guna mendanai pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU adalah sejumlah dana yang diberikan setiap tahun kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan spesifik dan prioritas daerah tersebut. Tujuan utama dari alokasi ini adalah menyediakan cukup dana bagi pemerintah daerah agar mampu melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya secara optimal.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban daerah berupa pengeluaran anggaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam memenuhi kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana dalam satu tahun anggaran. Tujuan dari adanya belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan

urusan bersama. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik secara mandiri sesuai dengan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip desentralisasi adalah konsep dalam pemerintahan dimana kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Menurut Halim (2013) hal ini mencerminkan kapasitas daerah untuk mendanai aktivitasnya melalui pendapatan dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat.

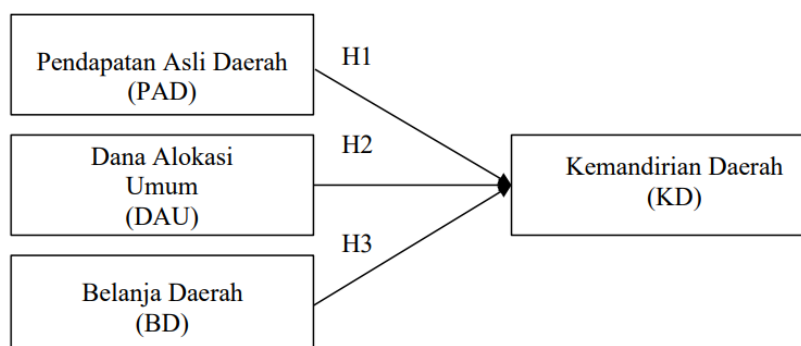
Tabel 2
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan	Rasio Kemandirian (%)	Pola
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: (Halim, 2004)

Menurut (Halim, 2004) dalam table diatas dijelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut: (a) Pola hubungan instruktif dengan rasio 0-25, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, daerah tidak mampu menjalankan otonomi daerah secara finansial. (b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. (c) Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat. (d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut sesuai peraturan daerah yang berlaku. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah. Sumber ini memainkan peran penting dalam pembangunan daerah, karena berasal dari potensi lokal yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah sesuai aturan hukum. Pendapatan Asli Daerah memberikan gambaran yang mencerminkan kemandirian suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah daripada bantuan dari pemerintah pusat maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian daerah tersebut tinggi (Achla dan Fidiana, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi salah satu faktor pendukung kinerja ekonomi makro. Studi oleh Nufrani (2018) mengenai hubungan antara PAD dan Kemandirian Daerah menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah.

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemandirian Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan untuk meratakan kapasitas keuangan antar-daerah dalam mendanai kebutuhan mereka dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk mencapai horizontal equity dan kecukupan. Horizontal equity mengacu pada kepentingan pemerintah pusat untuk mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata, sehingga mengurangi kesenjangan antar daerah.

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Belanja Daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berperan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang meliputi urusan wajib dan pilihan. Struktur belanja daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

H₃ : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji kebenaran atau ketidakbenaran teori yang telah ada. Dalam penelitian ini, dijelaskan pengaruh variabel independen (X) seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah terhadap variabel dependen (Y) yaitu Kemandirian Daerah. Variabel-variabel tersebut diukur, diklasifikasikan, dan dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat dianalisis menggunakan

metode statistik. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) data dari Laporan Realisasi APBD beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota pada Tahun 2019-2023 yang dipublikasikan pada website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Republik Indonesia. (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan data yang lengkap.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh suatu lembaga dan kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari web www.djpk.kemenkeu.go.id berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2019-2023. Data sekunder ini biasanya berupa catatan, bukti, atau laporan historis yang sudah diterbitkan, dan selanjutnya laporan tersebut dianalisis untuk menghitung variabel independen dan dependen yang menjadi fokus penelitian.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen bisa disebut variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen menggunakan kemandirian daerah. Kemandirian Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. . Alat ukur Kemandirian Daerah menggunakan rasio kemandirian yang telah dirumuskan sebagai berikut (Indriani dan Sastradipraja, 2014:60) :

$$\text{Rasio Kemandirian} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Daerah}} \times 100\%$$

Variable Independen

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih, yang diperoleh dari sumber-sumber seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta sumber-sumber lain yang sah. Pengukuran variabel PAD dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rasio PAD yang melihat jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan Daerah dalam periode tertentu. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio PAD} : \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan dengan tujuan untuk menyetarakan kemampuan keuangan setiap daerah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti potensi daerah, luas wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk, serta tingkat pendapatan masyarakat. Rasio DAU adalah ukuran yang digunakan untuk menganalisis proporsi DAU terhadap total pendapatan daerah dalam suatu periode tertentu. Dalam penelitian yang berkaitan dengan kemandirian daerah, rasio DAU sering digunakan untuk menilai ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio DAU : } \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Rasio belanja daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan membandingkan belanja daerah terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini penting dalam analisis keuangan daerah karena dapat mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran dalam membiayai pelayanan publik. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Daerah : } \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan metode analisis statistik yang perhitungannya menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution). Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis linear berganda adalah analisis mengenai satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode dalam pengelolaan data agar data tersebut dapat diinterpretasikan mengenai suatu kegiatan. Analisis deskriptif digunakan untuk banyak data yang diolah dan dilihat dari nilai minimal dan maksimum data, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2001) menyatakan bahwa uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependennya memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2018) dasar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1) jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal tersebut memperlihatkan bahwa pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, (2) jika data menyebar jauh atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selain menggunakan df pendekatan pendekatan grafik, uji normalitas juga dapat dilihat menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan kriteria: (1) bila nilai signifikansi ≥ 0.05

(alpha), maka nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal, (2) bila nilai signifikansi < 0,05 (alpha), maka berdistribusi tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Menurut Ghozali (2018:107) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value dan variance inflation factor (VIF).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2001) untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan cara melihat grafik scatterplot. Teknik Scatterplots digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas dengan menggabungkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan nilai SRESID (nilai residual). Dasar analisis metode ini yaitu: (1) apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka menunjukkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas, (2) apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2017:121) uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang dianggap baik apabila terlepas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut: (1) jika nilai DW < -2 maka autokorelasi positif, (2) jika nilai DW diantara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi, (3) jika nilai DW > +2 maka autokorelasi negatif.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur dan menguji kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang mana dapat menjelaskan ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Selain untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan dependen, analisis ini juga untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Daerah. Berikut ini adalah persamaan model yang digunakan:

$$KD = a + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 BD + e$$

Keterangan :

KD : Kemandirian Daerah

A : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

BD : Belanja Daerah
 e : Kesalahan Gangguan (Error)

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi adalah besarnya persentase yang diberikan variabel dependen terhadap variabel independennya (Suliyanto:2011). Koefisien determinasi juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh dalam kemampuan model untuk menjelaskan pada variasi variabel dependen. Nilai koefisien pada determinasi antara 0 sampai dengan 1. Adapun korelasi rentang mulainya adalah 0 dan 1 dengan kriteria sebagai berikut: (1) jika nilai R² yang mendekati 1 memiliki arti bahwa variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, (2) jika nilai R² yang mendekati 0 memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam memberikan informasi mengenai variasi variabel dependen amat terbatas.

Uji Kelayakan Model

Uji F

Menurut Ghozali (2017:22) menyatakan bahwa uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Maka dapat diartikan bahwa uji statistik F memiliki fungsi untuk melihat kesesuaian model, atau seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Kriteria dari pengujian secara simultan dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 ini meliputi: (a) jika nilai signifikansi $> 0,05$ menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian, (b) jika nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya dapat digunakan untuk menginterpretasikan seberapa jauh dalam kemampuan model untuk menerangkan pada variasi variabel dependen. Terdapat ketentuan hipotesis dengan menggunakan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ yaitu: (a) jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Ho diterima, Ha ditolak. (b) jika nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Ho ditolak, Ha diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PAD	30	.15	0.61	.3402	.13553
DAU	30	.14	.43	.3216	.08371
BD	30	.87	1.11	1.0165	.04885
KD	30	.19	1.69	.6230	.44534
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Data Sekunder, diolah 2025

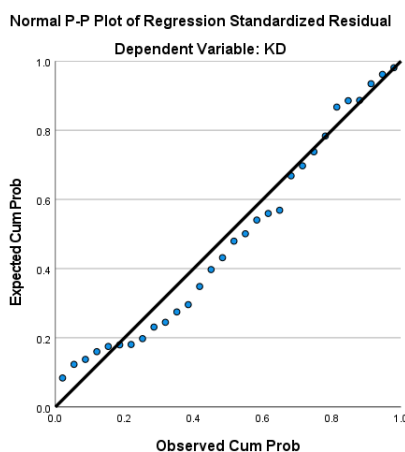
Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini menggunakan sejumlah 30 data. Hasil statistik deskriptif diatas dapat menyajikan penjabaran

dari variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 0.15 atau 15% dimiliki oleh Kabupaten Kediri pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah pada daerah tersebut masih rendah sehingga belum bisa membiayai daerahnya sendiri. Nilai maksimum sebesar 0.61 atau 61% dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat menggali potensi daerahnya sendiri tanpa perlu bantuan pemerintah pusat. Nilai rata-rata (mean) menunjukkan nilai sebesar 34% dan nilai standar deviasi sebesar 25.8%. (2) Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai minimum sebesar 0.14 atau 14% dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 0.43 atau 43% dimiliki oleh Kabupaten Kediri pada tahun 2019. Nilai rata-rata menunjukkan nilai sebesar 32.16% sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 8.371%. (3) Belanja Daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 0.87 atau 87% dimiliki oleh Kota Malang pada tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 1.11 atau 111% dimiliki oleh Kota Malang pada tahun 2023. Nilai rata-rata menunjukkan nilai sebesar 101% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 4.8%. (4) Kemandirian Daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 0.19 atau 19% yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerahnya rendah yang akan berdampak pada kemampuan daerah dalam mengembangkan potensinya. Nilai maksimum sebesar 1.69 atau 169% yang dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif terhadap kemandirian daerah karena daerah tersebut dapat mengembangkna. Nilai rata-rata menunjukkan nilai sebesar 62.3% yang artinya kemandirian daerah termasuk dalam kriteria sedang dengan pola hubungan partisipatif dan standar deviasi bernilai 44.5%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk menguji variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas menggunakan pendekatan grafik probability plot dan pendekatan kolmogorov-smirnov dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 2
Grafik Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa data atau titik-titik menyebar disepanjang garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.9693820
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.114
	Negatif	-.080
Test Statistic		.114
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Berdasarkan hasil uji kolmogorov-smirnov pada tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi (hubungan kuat) yang tinggi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam penelitian dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 5
Uji Asumsi Multikolinieritas Data

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
PAD	.596	1.677	Bebas Multikolinieritas
DAU	.608	1.645	Bebas Multikolinieritas
BD	.974	1.0272	Bebas Multikolinieritas

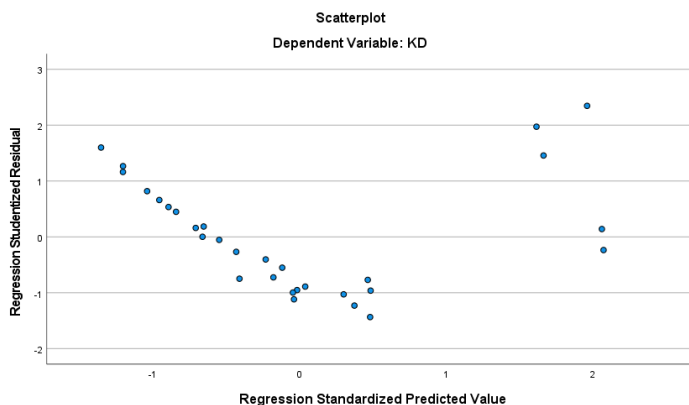
a. Dependent Variable: KD

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 5 diatas diketahui bahwa variabel independen PAD, DAU, BD memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF memiliki nilai kurang dari 10, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya masalah heteroskedastisitas dapat menggunakan metode analisis grafik. Metode grafik ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali 2017: 49). Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas:



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Pada gambar 3 grafik scatterplot diatas dapat diketahui bahwa titik titik dalam scatterplot tidak membentuk pola corong, sehingga dapat diidentifikasi bahwa tidak terjadi kasus heteroskedastisitas pada model regresi atau asumsi residual identik telah terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang dianggap baik apabila terlepas dari autokorelasi. Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi:

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.976 ^a	.953	.947	.10238	.799

a. Predictors: (Constant), BD, DAU, PAD

b. Dependent Variable: KD

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang ditunjukkan pada Tabel 6 dapat diketahui nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 0.799. Dengan asumsi diatas, nilai Durbin-Watson yang dihasilkan antara -2 sampai +2 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Pada penelitian ini nilai Durbin-Watson adalah $-2 < .799 < 2$, sehingga pada model regresi dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Metode ini digunakan untuk mengukur pengaruh yang ditimbulkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Daerah.

Tabel 7
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficient Beta	t	Sig.

1(Constant)	-.367	.415		-.884	.385
PAD	3.334	.182	1.015	18.355	.000
DAU	.304	.291	.057	1.044	.306
BD	-.238	.394	-.026	-.604	.551

a. Dependent Variable: KD

Sumber: Data sekunder, diolah 2025

Berdasarkan tabel 7, menunjukkan bahwa model persamaan regresi sebagai berikut:

$$KD = -0,367 + 3,334PAD + 0,304DAU - 0,238BD + e$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Nilai konstanta (α) sebesar $\alpha = -0,367$ yang menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah konstan atau tetap, maka besarnya kemandirian daerah adalah $-0,367$. (2) Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,334. Nilai koefisien pada variabel pendapatan asli daerah menunjukkan arah hubungan positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh, maka akan diikuti dengan kenaikan kemandirian daerah. (3) Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,304 menunjukkan adanya pengaruh yang searah antara Dana Alokasi Umum dengan Kemandirian Daerah yang berhubungan positif meskipun tidak signifikan. Apabila setiap terjadi peningkatan sebesar satu pada variabel Dana Alokasi Umum maka hasil dari Kemandirian Daerah akan mengalami peningkatan. (4) Koefisien regresi Belanja Daerah sebesar $-1,222$ yang menunjukkan adanya arah hubungan negatif antara Belanja Daerah dengan Kemandirian Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa jika terjadi penurunan Belanja Daerah sebesar 1,222 maka cenderung akan meningkatkan Kemandirian Daerah sebesar 1,222. Yang memiliki arti bahwa Belanja Daerah yang rendah maka kemandirian daerah akan meningkat.

Uji Kelayakan Model

Uji F

Uji F yang sering disebut sebagai uji kelayakan model atau uji signifikansi keseluruhan, bertujuan untuk menilai pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dalam regresi sampel. Uji F dilakukan untuk mengukur efektifitas model dengan kriteria pengujian tingkat signifikan $\alpha = 0,05$. Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model, apakah model persamaan yang terbentuk termasuk dalam kriteria cocok atau tidak.

Tabel 8
Hasil Uji Signifikansi F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.479	3	1.826	174.247	.000 ^b
	Residual	.273	26	.010		
	Total	5.752	29			

a. Dependent Variable: KD

b. Predictors: (Constant), BD, DAU, PAD

Sumber: Data sekunder, diolah 2025

Pada tabel 8 di atas menunjukkan nilai Fhitung adalah sebesar 174.247 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji F telah signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah layak untuk digunakan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penggunaan nilai Adjusted R Square dikarenakan apabila nilai R^2 mendekati satu, maka hubungan antara kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variabel dependennya semakin baik. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati nol, kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen dinilai sangat rendah.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.976 ^a	.953	.947	.10238	.799

c. Predictors: (Constant), BD, DAU, PAD

d. Dependent Variable: KD

Sumber: Data sekunder, diolah 2025

Berdasarkan table 9 di atas maka dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0.953. Nilai tersebut artinya terdapat 95.3% kontribusi yang diberikan oleh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Daerah. Sementara sisanya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Uji t

Uji t dalam penelitian bertujuan untuk menguji dan menunjukkan seberapa jauh dan maksimal pengaruh pada variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Uji t ini dilakukan dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yaitu jika tingkat signifikan $< 0,05$ maka hipotesis dapat diterima dalam arti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, jika tingkat signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau tidak diterima karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 10
Hasil Uji t

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficient Beta	t	Sig.
1(Constant)	-.367	.415		-.884	.385
PAD	3.334	.182	1.015	18.355	.000
DAU	.304	.291	.057	1.044	.306
BD	-.238	.394	-.026	-.604	.551

Dependent Variable: KD

Sumber: Data sekunder, diolah 2025

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 10 di atas menunjukkan bahwa: (1) nilai variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki t hitung sebesar 18.355 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap variabel Kemandirian Daerah sehingga hipotesis dapat diterima. (2) nilai variabel Dana Alokasi Umum memiliki t hitung sebesar 1.044 dengan nilai signifikansi sebesar 0.306 lebih besar dari 0.05. Artinya variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap variabel Kemandirian Daerah sehingga hipotesis ditolak. (3) nilai variabel Belanja Daerah memiliki t hitung sebesar -0.604 dengan nilai signifikansi sebesar 0.551 lebih besar dari 0.05.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap variabel Kemandirian Daerah sehingga hipotesis ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien sebesar 3.334 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Maka dapat dinyatakan bahwa H1 diterima, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah. Maka semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima suatu daerah maka akan menjadikan daerah tersebut semakin mandiri dalam membiayai kebutuhannya. Ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat pemerintah daerah memiliki lebih banyak dana untuk membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian finansial daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kemandirian daerah tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian dan Jouzar (2022), Neneng dan Nisa (2018), Eve dan Eka (2020), Oktavia (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah, yang berarti jika Pendapatan Asli Daerah meningkat tingkat Kemandirian Daerah juga meningkat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai koefisien sebesar 0.304 dengan nilai signifikan sebesar 0.306 yang berarti lebih besar dari 0.05. Maka dapat dinyatakan bahwa H2 ditolak, artinya variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan dana alokasi umum yang diperoleh pemerintah daerah tidak mempengaruhi kemandirian daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anikmah (2021), Wulan (2022) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah, hal ini sejalan dengan teori agensi yang menunjukkan adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi dalam hubungan keagenan tersebut. Pemerintah daerah sebagai agen cenderung menggunakan DAU untuk kepentingan jangka pendek seperti belanja rutin daripada mengalokasikannya untuk pengembangan ekonomi yang dapat meningkatkan PAD.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah memiliki nilai koefisien sebesar -1.222 dengan nilai signifikan sebesar 0.715 lebih besar dari 0.05. Maka dapat dinyatakan bahwa H3 ditolak, artinya Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariwibowo (2015), Wahyuni (2018), Utari dan Erinos (2020), yang menyatakan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah hal ini dapat dikaitkan dengan tingginya pendapatan daerah. Artinya, apabila suatu daerah dengan belanja daerah yang tinggi ataupun rendah, daerah tersebut tetap mandiri karena dari data sampel yang dipilih pada riset ini adalah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Jawa Timur. Daerah

mampu menghasilkan pendapatan yang besar dari pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain cenderung lebih mandiri secara fiskal sehingga peningkatan belanja daerah tidak menjadi faktor utama dalam menentukan kemandirian daerah. Tingginya pendapatan daerah memungkinkan suatu daerah untuk tetap beroperasi dan berkembang tanpa harus bergantung pada belanja daerah yang besar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, mengambil data dari Laporan Realisasi APBD beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota pada Tahun 2019-2023 yang dipublikasikan pada website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Republik Indonesia. Hasil pengujian sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokalnya secara efektif. Ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat pemerintah daerah memiliki lebih banyak dana untuk membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan dana alokasi umum yang diperoleh pemerintah daerah tidak mempengaruhi kemandirian daerah karena didukung oleh pendapatan daerah yang tinggi. Dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah seharusnya dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. (3) Belanja Daerah (BD) tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pembangunan atau pelayanan publik, peningkatan belanja daerah tidak berdampak terhadap kemandirian daerah karena telah didukung oleh pendapatan daerah yang tinggi. Salah satu alasan utama adalah bahwa kemandirian daerah lebih ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri seperti Pendapatan Asli Daerah daripada besaran belanja daerah yang dikeluarkan. Oleh karena itu meskipun belanja daerah bukan faktor utama dalam meningkatkan kemandirian daerah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tetap perlu ditingkatkan supaya penggunaan dana daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Keterbatasan

Pada penelitian yang telah dilakukan bahwa peneliti memiliki beberapa keterbatasan yang membuat penelitian ini belum sempurna. Berikut keterbatasan dalam penelitian ini: (1) Objek penelitian ini hanya berfokus pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Malang dengan rentan waktu 5 tahun yaitu tahun 2019-2023. Sehingga hasil penelitian ini tidak dapat mewakili secara umum daerah lain diluar Jawa Timur. (2) Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah dimana data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah, diharapkan mampu memaksimalkan potensi ekonomi

lokal dan memperluas berbagai sumber pendapatan, termasuk sektor pajak, retribusi daerah. Pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana daerah agar belanja daerah lebih efektif serta tepat sasaran untuk mendukung kemandirian daerah. (2) Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan menambah lebih banyak wilayah untuk memahami pola kemandirian daerah secara nasional. (3) Bagi masyarakat, instansi dan wajib pajak lainnya diharapkan lebih aktif mendukung kemandirian daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Anynda, N. S., dan Hermanto. 2020. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Arief, I. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pamekaran Provinsi Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*.
- Ariwibowo, T. 2015. Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 335-344.
- Azhar, I. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa . *Jurnal Transformasi Administrasi*.
- Basri. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah . *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*.
- Bella, S., dan Fitrah. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*.
- Dian dan Jouzar. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung.
- Erinos. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Eve dan Eka. 2020. Penaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal EKBI*.
- Fatmawati. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Febriyanti, E. M. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Mirai Management*.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2013. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Indriani, D., dan Sastradipraja. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Cirebon. *Portofolio* 11(1), 55-76.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Jakarta.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (revisi dari Undang-undang No.32 Tahun 2004)
- Juniawan. 2018. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal . *E-Jurnal Manajemen Unud*.
- Liando. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Flypaper Effect dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah. *Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Malau dan Parapat. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekbi*, 332-337.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Neneng dan Nisa. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Nindita dan Rahayu. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Journal Accounting And Finance*, 13-18.
- Nufrani. 2018. Pengaruh Anggaran Belanja Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumut. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*.
- Nurus, A. dan Fidiana. 2022. Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 11.
- Oktavia. 2021. Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi SPSS.
- Wahyuni, E. 2018. Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2-6.